

# FENOMENA KEBIJAKAN UANG KETAT DI INDONESIA

**P**ada saat menghadapi ketidakseimbangan atau gejala perekonomian seperti sekarang, pemerintah atau otoritas moneter pasti akan mengambil tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya roda perekonomian, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tetap tercapai. Tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut lebih kita kenal sebagai **Kebijakan Ekonomi Moneter**.

Dalam prakteknya, kebijakan moneter di satu sisi dapat digunakan sebagai peredam gejala perekonomian, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah baru atau tidak dapat mengatasi resesi. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter selain membawa dampak positif juga bisa menghasilkan dampak negatif.

Salah satu kebijakan moneter yang dianggap dapat mengatasi krisis ekonomi tanpa harus menguras cadangan devisa adalah Kebijakan Uang Ketat (*Tight Money Policy*). Kebijakan uang ketat diambil dalam rangka pelaksanaan Trilogi pembangunan terutama butir terakhir yaitu stabilisasi, atau lebih tepatnya adalah ingin melaksanakan pembangunan yang mantap dan berkesinambungan tanpa mengalami *Overheated*, laju inflasi yang tinggi dan gejala kurs yang fluktuatif yang dapat menimbulkan krisis.

Meskipun kebijakan uang ketat dapat menimbulkan lesunya kegiatan investasi dan turunya pertumbuhan ekonomi, namun kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kebijakan uang ketat tidak relevan untuk diterapkan, sebab seperti yang dikemukakan oleh *Sjahrir* bahwa *TMP* ini hanyalah bagian kecil dari kebijakan ekonomi makro, dan kebijakan makro itu meliputi pula kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan Luar Negeri dan kebijakan mengenai peraturan dan perizinan, yang kesemuanya itu harus bisa bekerjasama dalam mengatasi masalah perekonomian negara.

**B. RIYANI  
KRISNAWATI**  
Mahasiswa Ilmu  
Ekonomi dan studi  
Pembangunan  
FE UGM  
Angkatan 1995

## Konsep Pelaksanaan TMP dan Pengaruh yang Ditimbulkannya.

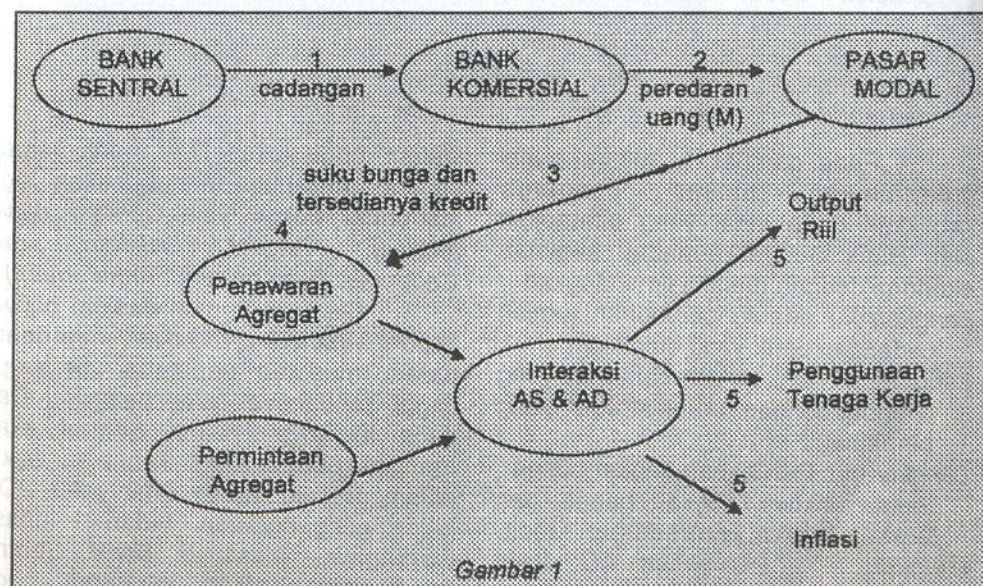
Pengurangan JUB pada awalnya cenderung akan mengetatkan uang, sebab uang menjadi mahal dan jumlahnya lebih sedikit. Berkurangnya kuantitas uang akan menaikkan biaya uang yang ditandai dengan naiknya suku bunga dan pengurangan jumlah kredit yang tersedia bagi masyarakat. Suku bunga yang tinggi tersebut pada akhirnya akan menurunkan aktiva masyarakat, seperti obligasi, saham tanah, dan kekayaan fisik lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung lebih tertarik menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan/deposito daripada dalam bentuk kekayaan-kekayaan lain yang telah disebutkan di atas.

Naiknya suku bunga juga akan menyebabkan jumlah kredit yang tersedia bagi dunia usaha banyak berkurang sehingga dapat menyulitkan dunia usaha terutama pengusaha kecil yang akan mengajukan kredit dan yang

sedang menerima kredit maupun pengusaha besar yang mempunyai kredit dalam skala besar di bank, sehingga jika mereka tidak kuat menanggung beban bunga yang tinggi usaha-usaha tersebut pasti terancam kredit macet dan bisa juga mengalami kebangkrutan.

Masalah lain yang timbul dari tingginya tingkat suku bunga adalah turunnya permintaan agregat ( $C+I+G$ ) sebagai akibat dari berkurangnya keputusan masyarakat untuk melakukan investasi. Dan akhirnya penurunan permintaan agregat tersebut akan menurunkan tingkat pendapatan, penerimaan pajak, output, kesempatan kerja dan inflasi.

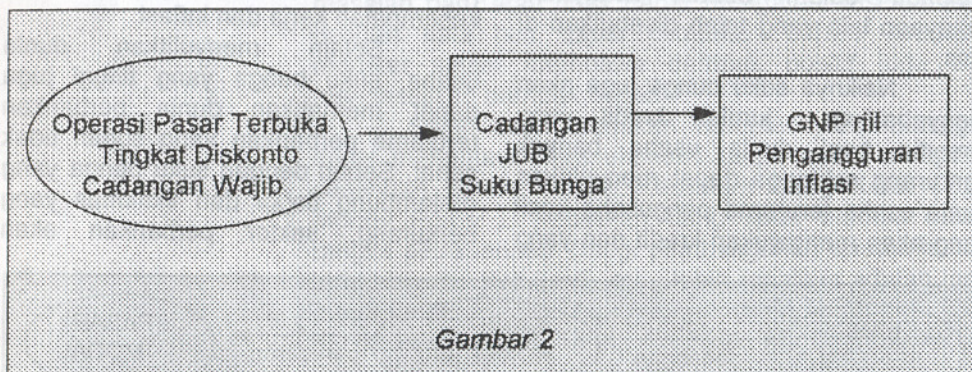
Selain menyulitkan dunia usaha, suku bunga yang tinggi juga dapat mematikan dunia perbankan terutama perbankan yang sudah tidak sehat. Sebab dengan suku bunga yang melambung tinggi dan likuiditas yang berkurang, sektor perbankan akan



Gambar 1



kesulitan dalam menyalurkan dananya dan terancam kredit macet, padahal seperti yang kita ketahui return perbankan diperoleh dari pendapatan bunga kredit. Sehingga dengan penyaluran kredit yang sulit dan banyaknya kredit macet, sementara biaya bunga tabungan yang harus dibayarkan bank untuk penabung tinggi, maka tidak mengherankan jika perbankan kemudian mengalami *insolvency*. Adanya kebijakan uang ketat juga menyebabkan bank-bank harus memasukkan *inflation premium* guna mengkompensasi penurunan keuntungan riil dalam berbagai transaksi mereka.



Pada gambar 1, secara grafis diperlihatkan proses pengaruh kebijakan uang ketat yang ditetapkan oleh Bank Sentral terhadap kegiatan ekonomi dengan melalui lima langkah :

**Langkah I :** adalah perubahan jumlah cadangan bank yang dinaikkan.

**Langkah II :** adalah perubahan M yang ditandai dengan turunnya JUB, yang berakibat:

**Langkah III :** Perubahan tingkat bunga, yaitu naiknya tingkat bunga dan berkurangnya ketersediaan kredit.

**Langkah IV :** Perubahan AD, yaitu menurunnya AD sebagai akibat

pengurangan pengeluaran yang peka terhadap tingkat bunga.

**Langkah V :** Terjadinya tingkat perubahan output yang menurun, tingkat penggunaan tenaga kerja yang menurun dan laju inflasi.

Namun demikian, seperti yang telah dikemukakan dalam pendahuluan kebijakan uang ketat bukanlah satu-satunya instrumen yang mempengaruhi kegiatan perekonomian, sebab dalam setiap kegiatannya kebijakan fiskal selalu masuk kedalamnya atau dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter akan menjadi partner bagi kebijakan fiskal.

Dalam menetapkan *TMP* bank Sentral secara langsung menggunakan tiga instrumen pokok yaitu, *Operasi pasar terbuka*, *Tingkat diskonto*, dan *Cadangan Bank (reserve requirement)*.

Gambar 2. menjelaskan bahwa instrumen-instrumen kebijakan membantu dalam masalah penentuan besarnya tinggi rendahnya suku bunga. Dan pada akhirnya Bank Sentral akan menjadi partner bagi kebijakan fiskal dalam menuju tujuan akhir yaitu GDP riil, pengangguran dan inflasi. Sayangnya, biasanya Bank Sentral hanya memusatkan perhatian pada

sasaran pertumbuhan uang atau tingkat suku bunga.

Tiga instrumen pokok dalam kebijakan uang ketat.

- **Operasi Pasar Terbuka**, yaitu proses kegiatan jual beli obligasi pemerintah. Dengan menjual surat berharga pada masyarakat, Bank Sentral dapat mengendalikan JUB sesuai yang diinginkan.

Di Indonesia Operasi Pasar Terbuka dijalankan melalui penjualan atau pembelian SBI dan SBPU. Penjualan SBI atau peningkatan suku bunga SBI akan menarik dana masyarakat masuk ke BI sehingga uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang. Selain menggunakan SBI, Bank Indonesia dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membekukan SBPU sebab selain menambah JUB lewat penyaluran kredit SBPU juga sering digunakan untuk spekulasi mata uang asing.

- **Kebijakan Tingkat Diskonto**, yaitu penentuan suku bunga yang dikenakan pada cadangan Bank Sentral yang biasa dipinjam oleh bank umum sebagai anggotanya. Ketika Bank Sentral merasa perlu untuk "mengerem" laju JUB, maka tingkat diskonto akan dinaikkan, sebab kenaikan tingkat diskonto akan menyebabkan bank umum mengurangi pinjamannya di Bank Sentral dan selanjutnya pemberian pinjaman dana kepada masyarakat juga akan berkurang.

- **Cadangan Wajib Minimum** atau *Reserve Requirement*. Jalan yang diambil Pemerintah dalam mengendalikan JUB melalui cadangan wajib ini dilakukan dengan cara menaikkan cadangan wajib minimum. Dengan menaikkan

cadangan wajib minimum maka bank komersial akan mengalami kekurangan likuiditas sehingga jumlah uang yang mengalir ke masyarakat, yaitu dalam bentuk pinjaman akan dikurangi, sehingga JUB yang beredar di masyarakat juga dapat dikurangi.

Selain ketiga instrumen pokok itu, Bank Sentral juga mempunyai dua instrumen minor, yaitu:

- **Himbauan Moral (Moral Suasion)** Pelaksanaan kebijakan ini bukan dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan tertulis, melainkan dengan jalan mengadakan pertemuan, pemberian saran dan himbauan kepada bank umum seperti merger atau penurunan suku bunga yang terlalu tinggi.

- **Pagu Suku Bunga** yang akan dibayar oleh bank antar berbagai jenis simpanan. Melalui penetapan pagu suku bunga kredit, perbankan diharapkan membatasi pemberian kredit pinjaman. Kebijakan pagu kredit ini juga ditunjang dengan kebijakan kredit selektif, yaitu pemberian kredit untuk sektor-sektor penting yang dianggap mampu menurunkan harga umum yaitu melalui pemberian kredit likuiditas dengan bunga relatif rendah. Kredit selektif dalam *TMP* juga diberikan kepada usaha-usaha kecil seperti usaha kecil yang berorientasi ekspor, KUT, dan KPR untuk RS dan RSS

### Fenomena Kebijakan Uang Ketat di Indonesia

Selama Orde Baru *TMP* sebenarnya telah kita gunakan sebagai alat peredam gejolak ekonomi khususnya inflasi sejak tahun 1970-an. Namun selama pelaksanaan kebijakan uang ketat dari tahun 1970 sampai



sekarang, terdapat tiga *event* yang paling menarik dalam pelaksanaan *TMP*, yaitu Gebrakan Sumarlin I pada tahun 1987, Gebrakan Sumarlin II pada tahun 1990, dan Pengetatan Likuiditas pada bulan Juli tahun 1997 kemarin.

Deregulasi 1983 ternyata telah mengarahkan kebijakan moneter kita cenderung ekspansif daripada kontraktif, sebab sejak paket deregulasi ini digulirkan volume kredit perbankan setiap tahunnya cenderung meningkat terus dan tingkat suku bunga juga bebas bergerak. Namun di tengah-tengah kecenderungan ekspansif tersebut pada pertengahan tahun 1987 muncul kebijakan moneter yang cenderung kontraktif yaitu Gebrakan Sumarlin I. Pada Gebrakan Sumarlin I telah dilakukan absorpsi rupiah dengan tujuan untuk menghentikan spekulasi valuta asing. Oleh karena itu dengan persetujuan Presiden, Prof. Dr. B.J. Sumarlin mengubah Rp. 1,3 Trilyun yang berupa dana giro dan deposito sejumlah BUMN menjadi SBI, dan membekukan SBPU yang dipegang bank-bank umum. Ternyata kebijakan yang dikeluarkan tersebut terbukti manjur, sebab uang beredar dapat ditarik dan rupiah kembali menguat. Kebijakan uang ketat tahun 1987 ini hanya berlangsung selama 2-3 bulan dengan suku bunga deposito mencapai 24% dan suku bunga kredit mencapai 27%.

Setelah Paket Deregulasi 1983 kemudian muncul Deregulasi kedua pada bulan Oktober 1988 yaitu Pakto 1988, Pakto 1988 antara lain ini berisi pemberian kemudahan pendirian bank-bank dengan tujuan agar dana masyarakat lebih cepat termobilisasi.

Kemudahan pendirian bank-bank telah menyebabkan jumlah bank baru semakin membengkak sehingga likuiditas perbankan dan perekonomian

menjadi tinggi, dan jumlah kredit di masyarakat juga semakin tinggi pula, sehingga JUB yang ada di masyarakat meningkat.

Uang beredar yang cenderung ekspansif itu pada akhirnya telah mendorong kenaikan tingkat inflasi, sebab arus uang yang beredar lebih banyak daripada arus barang. Keadaan ini pulalah yang menyebabkan inflasi pada tahun 1990 hampir mencapai 10% padahal sasaran inflasi pada Repelita V hanya ditargetkan 5% pertahun. Inflasi yang sudah mencapai dua digit tersebut tentu saja membuat otoritas moneter was-was dan merasa perlu mengambil tindakan, sebab inflasi yang tak terkendali akan melemahkan rupiah, dan bila hal ini dibiarkan terus maka kemungkinan akan terjadi *capital flight* dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi.

Untuk mengatasinya pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan uang ketat yang dikenal sebagai Gebrakan Sumarlin II. Melalui paket Januari 1990 kredit likuiditas ditarik oleh pemerintah sebanyak 3 trilyun rupiah, BUMN diwajibkan mengalihkan dananya yang selama ini disimpan di bank-bank pemerintah dan swasta untuk dialihkan menjadi SBI. Kontraksi moneter yang mendadak pada tahun 1990 telah menaikkan tingkat bunga deposito menjadi 21%-23%, dan tingkat bunga kredit menjadi 26%-28%, sehingga dapat dibayangkan yang terjadi selanjutnya, yaitu banyaknya perusahaan yang menghadapi kesulitan *cashflow* dan kesulitan pembayaran kredit sehingga terjadilah banyak kredit macet, apalagi pada tahun tersebut telah terjadi penambahan 135 pabrik baru yang belum siap beroperasi secara penuh. Sehingga dengan adanya kebijakan uang ketat banyak pabrik-

pabrik baru tadi yang kesulitan likuiditas bahkan terancam gulung tikar.

Sebab dengan tingkat bunga pinjaman yang berkisar 26%-28% maka return on investment dari kredit yang dipinjam harus sebesar 30%-34%. Maka perusahaan mana yang sanggup mencapai return on investment sebesar ini.

Jika musuh *TMP* pada Gebrakan Sumarlin I para spekulatif, dan musuh *TMP* pada Gebrakan Sumarlin II adalah laju inflasi, maka pada tahun 1997 musuh *TMP* tidak sesederhana itu. Musuh yang harus dihadapi oleh kebijakan uang ketat tahun 1997 lebih pelik lagi, sebab kita tidak hanya dihadapkan oleh spekulatif semata atau laju inflasi saja, melainkan kita dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang lebih kompleks, yaitu oleh spekulatif, krisis kepercayaan, dan kenyataan tentang bobroknya indikator-indikator fundamental ekonomi kita seperti hutang luar negeri, laju inflasi, defisit neraca pembayaran Indonesia, dan sedikitnya cadangan devisa yang kita miliki.

Krisis Moneter tahun 1997 ditandai dengan melemahnya rupiah pada bulan Juli 1997. Tekanan terhadap rupiah yang semakin besar tersebut menyebabkan pemerintah mengambil tindakan sama seperti ketika menghadapi para spekulatif pada tahun 1987. Pada tanggal 4 Agustus BI menaikkan SBI untuk jangka waktu 6 hari dari 6% menjadi 15% dan untuk jangka waktu satu minggu dari 7% menjadi 10%. Selain tindakan tadi BI juga membekukan SBPU, tindakan ini diambil supaya masyarakat atau spekulatif lebih memilih memegang rupiah daripada dollar sebab tingkat bunga yang ditawarkan bank menjadi tinggi dan supaya SBPU tidak digunakan untuk tujuan spekulatif.

Ternyata tindakan tersebut belum memberikan hasil yang positif. Melihat kenyataan rupiah yang terus merosot BI terpaksa menaikkan suku bunga SBI dari 10% menjadi 22% untuk satu minggu, 28% untuk tiga bulan dan 30% untuk satu bulan. Dana deposito BUMN dan dana pensiun di perbankan juga ditarik ke rekening BI.

Langkah BI ini tentu saja telah membuat sektor perekonomian menjadi kalang kabut. Bank-bank menjadi kesulitan likuiditas dan dunia usaha menjadi sesak napas sebab kenaikan suku bunga SBI dengan angka yang tidak kepalang tanggung tersebut menyebabkan suku bunga deposito di perbankan meroket tinggi sekali. Dengan kenaikan suku bunga SBI maka perbankan juga menaikkan suku bunga depositonya sebesar 30% sehingga suku bunga kredit juga ikut dinaikkan menjadi sekitar 40% dan suku bunga *overnight* juga bergerak sampai di atas angka 100 bahkan pernah sampai mencapai di atas angka 200.

Dengan suku bunga kredit yang sangat tinggi, perbankan menjadi sulit sekali untuk menyalurkan kreditnya sementara itu mereka harus memberikan bunga deposito yang besar pula, keadaan ini masih ditambah dengan adanya kredit macet. Jika tidak diantisipasi sebelumnya maka timbul ketidakpercayaan masyarakat dan akhirnya bisa menimbulkan *rush*.

Kenaikan suku bunga kredit yang terlampaui tinggi tersebut juga telah berpengaruh pada kegiatan Bursa Efek Jakarta, sebab suku bunga yang tinggi akan menaikkan modal biaya beban bunga pinjaman dan kredit macet. Persoalan-persoalan yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang masuk ke bursa itu pada akhirnya akan



menyebabkan keinginan investasi dalam bentuk efek menjadi berkurang, kecuali itu prospek perusahaan dimasa mendatang yang kurang cerah juga akan menyebabkan aksi jual secara berlebihan sehingga tidaklah mengherankan jika IHSG di Bursa Efek Jakarta merosot bahkan pernah mencapai angka 200-an, aksi jual tersebut terjadi karena masyarakat merasa keuntungan yang di dapat dari efek tersebut lebih kecil dari bunga bank yang ditawarkan atau lebih kecil dari keuntungan yang akan diperoleh jika mereka memegang dollar.

Keadaan yang sama juga dialami oleh sektor properti, sektor yang sedang mengalami *oversupply* dan banyak kredit macet ini tentu saja akan semakin kesulitan menghadapi suku bunga kredit yang melejit bahkan kredit macetnya diperkirakan juga akan bertambah membengkak. Sehingga dapat dikatakan pengetatan likuiditas pada krisis moneter sekarang dampaknya lebih dahsyat daripada gebrakan pengetatan likuiditas sebelumnya. Sebab meskipun pengetatan likuiditas hanya sekitar Rp 4 Trilyun akan tetapi pengetatan tersebut dapat mengeringkan rupiah sehingga kegiatan ekonomi menjadi bergejolak secara hebat.

Selama pelaksanaannya, pengetatan rupiah selalu menjadi bahan pembicaraan hangat dan sumber perdebatan, sebab kebijakan uang ketat hampir dipastikan selalu memunculkan reaksi pro dan kontra. Ini terjadi karena ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pula pihak yang merasa dirugikan.

Menanggapi pengetatan likuiditas pada krisis sekarang ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa langkah yang diambil oleh otoritas moneter dalam mengatasi krisis

dengan melakukan kebijakan uang ketat sudah tepat. Sebab hal yang paling penting untuk dicapai sekarang adalah stabilitas, selain itu kebijakan uang ketat juga mampu mengamankan cadangan devisa. Bahkan ada yang meminta agar kebijakan uang ketat diteruskan sebab dikhawatirkan jika likuiditas dikendorkan maka pasokan rupiah akan digunakan untuk membeli dollar. Namun demikian mereka juga tetap mengharapakan rupiah dikendorkan jika perekonomian sudah stabil.

Namun ada pula yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan uang ketat pada krisis moneter sekarang sudah melampaui batas dan dapat mengancam kebangkrutan dunia usaha. Oleh **Laksmana Sukardi** pengetatan likuiditas kali ini dianggap telah menciptakan krisis likuiditas dan krisis ini dampaknya lebih luas daripada krisis kurs, sebab jika pada krisis kurs yang merasakan dampaknya adalah *big player* maka pada krisis likuiditas dampaknya lebih luas dan telah menimbulkan kepanikan yang berkepanjangan.

Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan orang menjadi tidak percaya kepada rupiah dan perekonomian. Pendapat yang senada juga juga dilontarkan oleh **McLeod** (pengamat ekonomi dari Universitas Harvard), **McLeod** menentang resep pengetatan moneter dan fiskal yang selalu diberikan IMF, sebab Asia tidak menghadapi *Hyperinflasi* seperti Amerika Latin.

Pengetatan fiskal dalam bentuk penurunan anggaran belanja pada APBN sifatnya kontraproduktif sehingga justru akan memperlemah perekonomian. Kecuali itu, sikap pemerintah yang terpaku pada sasaran defisit transaksi berjalan dan kebijakan uang ketat telah menunjukkan sikap segan untuk

menyerahkan kurs pada pasar padahal pemerintah telah menyerahkan kurs pada pasar, sehingga kecenderungan menghalangi mekanisme pasar justru akan menghambat tercapainya pemulihan ekonomi yang lebih sehat.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra diatas, sebenarnya harapan kedua belah pihak tetap sama yaitu agar pengetatan likuiditas sifatnya sementara, artinya jika keadaan sudah mulai stabil pengetatan likuiditas segera dilonggarkan sebab *cost* yang harus kita keluarkan untuk pelaksanaan kebijakan ini sudah terlampau besar. Kecuali itu jika pemerintah tetap berusaha mempertahankan kenaikan SBI dan melakukan pembekuan SBPU secara terus menerus maka hal tersebut justru akan merugikan kita sendiri sebab bunga menjadi mahal sehingga kegiatan investasi akan terhenti dan harga barang semakin lama semakin naik.

Kenaikan harga pada akhirnya menyebabkan barang-barang kita tidak kompetitif di pasar internasional sehingga ekspor sulit kita tingkatkan padahal defisit neraca pembayaran kita semakin besar, maka jika keadaan ini kita biarkan terus, rupiah akan semakin terdepresiasi. Tertahannya gerak inflasi akan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja sehingga pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial akan semakin meningkat.

Pada krisis moneter sekarang, **TMP** yang kita ambil untuk mengatasi gejala perekonomian, ternyata tidak secemerlang Gebrakan Sumarlin yang lalu. Kenaikan suku bunga SBI yang diikuti meroketnya suku bunga bank dengan tujuan agar masyarakat maupun spekulan lebih memilih memegang rupiah daripada dollar ternyata tidak terjadi dalam mekanisme

pasar, rupiah tetap melemah bahkan semakin terpuruk dan anggapan bahwa masyarakat lebih memilih rupiah juga tidak terjadi sebab masyarakat justru memburu dollar. Keadaan perekonomian juga semakin memburuk, banyak perusahaan yang kesulitan likuiditas akhirnya berusaha mengurangi inputnya dengan cara memotong jumlah pekerja sehingga bertambahlah pengangguran.

Dari kenyataan-kenyataan diatas maka tidak salah jika **TMP** kali ini dikatakan kurang efektif. Kekurang efektifan kebijakan uang ketat pada krisis moneter sekarang juga bisa dilihat dari angka inflasi yang kita capai tahun 1997 kemarin. Inflasi selama tahun 1997 ternyata mencapai 11,05% angka ini tentu saja bisa digunakan sebagai evaluasi dari kebijakan uang ketat yang sudah kita laksanakan sejak bulan Juli, padahal esensi dari kebijakan uang ketat adalah mengendalikan laju inflasi.

Kenaikan harga tersebut selain karena kenaikan harga bahan baku dan barang-barang impor juga disebabkan karena adanya penyesuaian harga yang dilakukan produsen akibat naiknya suku bunga kredit.

Meskipun demikian kita tidak bisa menyalahkan pengetatan likuiditas sebagai sumber penyebab masalah masalah di atas, sebab ada faktor faktor lain diluar lingkup teori dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan uang ketat kali ini, misalnya hutang luar negeri dan krisis kepercayaan. Sebab dalam **TMP** diasumsikan tidak terdapat Hutang luar negeri yang sedang jatuh tempo dan krisis kepercayaan. Dengan adanya kedua hal tersebut maka meskipun likuiditas diketatkan, permintaan dollar akan tetap banyak karena keperluan untuk membayar hutang sangat mendesak, keadaan ini tentu saja menyebabkan permintaan dollar



lebih besar daripada pasokannya sehingga rupiah tetap terdepresiasi

Berhasil tidaknya *TMP* juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain yang ada dalam ekonomi makro, sebab meskipun *TMP* sudah dijalankan secara benar dan konsisten, jika kebijakan lain tersebut tidak mendukung maka *TMP* akan sia-sia.

## Penutup

Suatu kebijakan tidak hanya menghasilkan dampak positif saja, namun juga mengandung resiko di dalamnya. Penggunaan Kebijakan Uang Ketat sebagai peredam ketidakstabilan ekonomi selama ini disebabkan belum ditemukannya kebijakan moneter lain yang dianggap dapat meredam gejolak perekonomian, meskipun kebijakan uang ketat itu sendiri belum sepenuhnya sempurna. Sehingga ada baiknya jika kita mulai mencari suatu alternatif kebijakan lain yang *costnya* lebih sedikit dan dampaknya tidak terlalu merugikan.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah reformasi secara menyeluruh terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penghapusan praktek-praktek kotor, seperti monopoli, kolusi dan korupsi. Di dukung dengan pembenahan kembali birokrasi yang

terlalu berbelit-belit, yang telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Sebab sebaik apapun suatu kebijakan, jika keadaan ekonomi kita tetap seperti yang dulu maka kebijakan itu tidak akan mencapai target.

## Daftar Pustaka

- Econit Advisory Group (Economic Outlook), **Proyeksi Ekonomi Indonesia 1995**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Gunawan, Anton Hermanto, **Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Insukindro, **Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia**, BPFE, Yogyakarta, 1995
- Samuelson, Paul A, and Nordhaus, William D, **Economics**, 12th Edition, Mc Graw-Hill, Inc, 1985
- Sjahrir, **Persoalan Ekonomi Indonesia: Moneter, perkreditan dan Neraca Pembayaran**, Pustaka Sinar harapan Jakarta, 1995
- Gatra**, Nomor 6, Tahun IV, 27 Desember 1997
- Kompas**, Berbagai Edisi
- Kontan**, Nomor 7, Tahun II, 10 November 1997
- Warta Ekonomi**, berbagai edisi